

Judul : DPR Bentuk Pansus Gabungan
Tanggal : Sabtu, 27 Agustus 2022
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

Tuntaskan Nasib Jutaan Guru Honorer

DPR Bentuk Pansus Gabungan

Proses seleksi sejuta guru honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) belum juga tuntas hingga saat ini. Butuh dorongan kuat agar masalah ini segera terselesaikan.

KETUA Komisi X DPR Syaiful Huda menilai, nasib guru honorer terus tertang-katung karena ketidaksiapan langkah pemerintah.

"Waka kami mendorong untuk membentuk panitia khusus (Pansus) Gabungan lintas komisi DPR," ujar Huda dalam keterangannya, kemarin.

Huda menjelaskan, Pansus Gabungan Seleksi Sejuta Guru Honorer menjadi PPPK ini terdiri dari anggota Komisi II, Komisi X, dan Komisi XI.

Pansus Gabungan ini nantinya berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset Teknologi (Kemendikbudristek), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Pandayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), Kementerian Keuangan dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Pansus ini ada langkah-langkah taktis agar berbagai kendala yang menghalangi proses seleksi juta guru honorer menjadi PPPK segera terselesaikan.

los seleksi, proses mendapatkan nomor induk pegawai, hingga bagaimana proses penggajian mereka.

"Karena itu tidak cukup dorongan dan pengawasan dari Komisi X DPR saja," ujar Huda.

Huda mengungkapkan, ada beberapa agenda yang akan dikawal serius oleh Pansus Gabungan Guru Honorer ini. Antara lain, memastikan guru yang telah lulus seleksi tapi tidak mendapatkan formasi, diusulkan formasinya pada seleksi PPPK tahap III dan diprioritaskan untuk terlebih dahulu diangkat menjadi PPPK.

Dalam ketertuan ini, guru honorer yang telah mengabdikan di atas 10 tahun akan diprioritaskan.

"Pansus Gabungan juga meng-kaji ulang opsi penambahan Dana Alokasi Umum (DAU) Pemerintah Daerah untuk pemenuhan kebutuhan peng-anggaran guru honorer menjadi PPPK," katanya.

Selain itu, kata Huda, Pansus Gabungan mendorong Pemerintah membuat *road map* penyelesaian guru honorer se-

cara menyeluruh mulai dari rekrutmen, penganggaran dan koordinasi dengan Pemerintah Daerah.

Pansus juga akan memastikan adanya proporsi terbaik bagi guru honorer di sekolah negeri dan swasta.

Dalam waktu dekat, pihaknya akan menghadap ke pimpinan DPR untuk mengkomunikasikan rencana pembentukan Pansus Gabungan untuk guru honorer ini.

"Yang pasti, kami berkomitmen agar persoalan guru honorer ini segera dituntaskan, sehingga mereka mendapatkan kepastian jaminan kesejahteraan dari negara," tandasnya.

Senada, Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih mengingatkan, Mendikbudristek mengenai nasib PPPK yang terombang-ambing. Pasalnya, sejak pengumuman pertama kelulusan PPPK pada 8 Oktober 2021, Komisi X DPR sangat sering didatangi para guru dan tenaga kependidikan yang mem-

peranyakan nasib mereka yang belum kunjung mendapatkan Surat Keputusan (SK).

"Kami terus monitor, tujuh

bulan pertama mereka melapor kesulitan mendapatkan peng-hasilan karena yang swasta sudah diberhentikan. Sementara yang negeri sudah tidak diberi jam mengajar dan digantikan orang lain," ujar Fikri dalam keterangannya, kemarin.

Fikri mengatakan, ada 293 ribu guru yang sudah menda-pat formasi tetapi belum men-dapatkan SK. Dia khawatir, akan seperti kelulusan pada tahun 2019 yang baru mendapatkan SK pada 2021.

Selain itu, penempatan guru PPPK ada yang memberi opsi ke luar Jawa seperti ke Kalimantan Utara bahkan Papua. "Tapi rata-rata mereka tidak bersedia, ada yang bersedia kalau di Jawa saja," imbit politik PKS ini.

Fikri mengimbau Kemen-dikbudristek dapat lebih mengayomi para guru tersebut, meski persoalan pengangkatan PPPK ini juga melibatkan Ke-menpan RB, BKN, bahkan Kemenkeu.

"Mereka ingin ada 'bapaknya' yang mengayomi dan memberi kepastian status, kesejahteraan dan jaminan sosial mereka," pungkasnya. ■ TF